

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS SISTEM INFORMASI DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2017)

Oleh:

TIAS WIDIA APRILIYANTI RUDIANA
20130520216

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

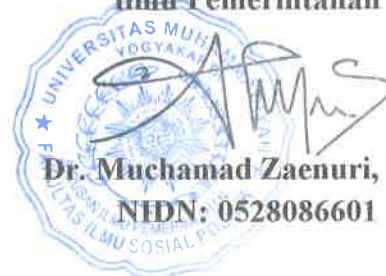

Dr. Saranto, M.Pol.
NIDN: 0512056501

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik


Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

Latar Belakang

Dengan adanya undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dari dan oleh rakyat. Sistem informasi desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi undang-undang tersebut terutama yang sudah diatur pada pasal 86 yang berjudul “Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan” . Sistem informasi desa ini meliputi data desa, data pembangunan desa, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Dalam mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa COMBINE Resource Institution sebuah organisasi masyarakat sipil membuat Sistem Informasi Desa sebagai alternatif atas profil desa. Sistem Informasi Desa sangat membantu mengolah data-data sehingga menjadi poin tersendiri sebagai masukan dalam perencanaan desa maupun pertimbangan dalam mengambil keputusan kebijakan pemerintah desa.

Salah satu desa yang sudah menjalankan Sistem Informasi Desa ini

adalah Desa Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Desa terpencil dengan kesejahteraan masyarakat yang rendah ini kini menjadi desa digital yang di dunia maya. Seperti dikutip dari *website* resmi Desa Dlingo (dlingo-bantul.desa.id), bahkan kini Desa Dlingo meraih penghargaan dibidang Sistem Informasi yakni sebagai Desa Pelaksana Sistem Informasi Desa terbaik Se-Kabupaten Bantul dari Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul.

Melalui Sistem Informasi Desa kini Desa Dlingo mampu menampung dan mengolah data bahkan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari data kependudukan hingga dari potensi-potensi unggulan desa. Sistem Informasi Desa sangat membantu mengolah data-data sehingga menjadi poin tersendiri sebagai masukan dalam perencanaan desa maupun pertimbangan dalam mengambil keputusan kebijakan pemerintah desa.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem informasi desa khususnya Desa Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keberadaan komunitas tertentu yang berdiam di tempat tertentu, atau mengenai gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.

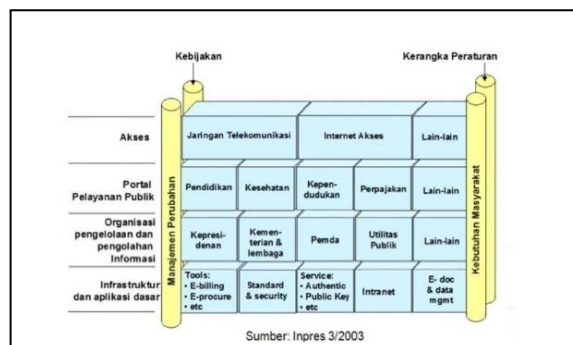
Dalam hal ini peneliti berusaha menemukan fakta dan memahami permasalahan yang dihadapi pada proses impementasi sistem informasi desa dalam pembangunan desa. Masalah yang dikemukakan adalah faktor-faktor yang membuat keberhasilan Sistem Informasi Desa.

Kerangka Teori

E-government

E-government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis tekonologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi dan komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi *E-Government* dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan sebagai bentuk wujud keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan infomrasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *E-Government* berorientasi pada kerangka dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka *E-Government*

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kerangka arsitektur *E-Government* terdiri dari empat lapis struktur seperti berikut ini:

a. Akses

Akses merupakan ujung dari saluran komunikasi, jaringan internet atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai portal layanan publik.

Cara akses di setiap daerah selalu berbeda karena tergantung pada kondisi infrastruktur jaringan komunikasi dan kesiapan pemerintah serta masyarakat pengguna.

Senada dengan siapnya pemerintah diharapkan setiap lembaga pemerintah menyediakan layanan public

yang dapat mudah diakses melalui situs web. Akses ini berhubungan dengan jaringan telekomunikasi, jaringan internet, media komunikasi lainnya yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses situs pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah.

b. Portal Pelayanan Publik

Portal pelayanan public adalah situs web penyedia layanan public yang diberikan oleh suatu pemerintahan. Pemerintahan yang melaksanakan pelayanan public harus bertanggungjawab terhadap informasi yang diberikan. Layanan portal yang diberikan harus dapat diakses 24 jam, 7 hari, dalam 1 minggu tanpa ada batasan waktu dan tempat.

Portal layanan public yang dimaksud adalah situs web pemerintah yang berbasis internet yang memberikan informasi dan

dokumen elektronik dari instansi terkait.

c. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi

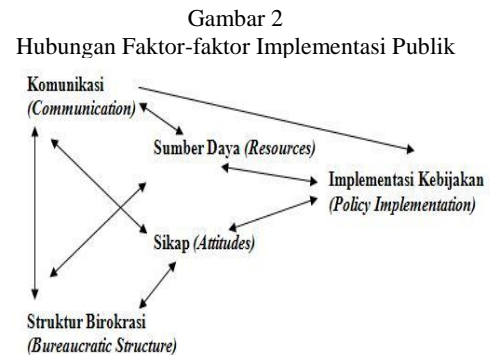
Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi adalah yang menyediakan, mengelola, dan mengolah informasi dan dokumen elektronik bisa disebut juga dengan *back office*.

d. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar

Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar *back office*, antar portal pelayanan publik dengan *back office*), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Implementasi Kebijakan Publik

Edward mengemukakan bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik. Interaksi antara faktor-faktor dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: GEORGE C. EDWARD III, 1980: 9)

Adapun secara terperinci dalam Edward III (1980) penjelasan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian penting agar implementasi dapat efektif. Dimana dalam mengimplemDalam komunikasi menurut Edward III, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni:

1. Transmisi
2. Kejelasan (*clarity*)
3. Konsistensi (*consistency*)

b. Sumber Daya

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif maka dibutuhkan sumber daya yang cukup. Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementator kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Berikut adalah beberapa sumber daya yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan:

1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Peralatan
3. Sumber Daya Wewenang

c. Disposisi (sikap kecenderungan)

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka

akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin mudah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang tepat dapat memberikan dukungan kuat terhadap kelancaran implementasi kebijakan dapat dua hal penting dalam birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard dan fragmentasi (Mutiarin dkk, 2014:25-34).

Sistem Informasi Desa

Menurut CRI (Combine Resource Institution), Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas di tingkat desa.

Kaitan dalam hal ini kemungkinan besar Pengejawantahan SID oleh negara kala itu adaah mengadopsi model yang dikembangkan oleh CRI.

Sistem informasi desa yang dibangun semuanya mengarah pada satu tujuan utama yaitu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan ini mencakup:

1. Pengembangan standarisasi pelayanan
2. Peningkatan efisiensi pelayanan
3. Pelayanan yang lebih terjangkau oleh semua pihak
4. Pembaharuan data sesuai kebutuhan masyarakat

Pembangunan Desa

Adanya pembangunan desa diharapkan dapat member peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung baik itu dari adanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek tujuan pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efeasensi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan juga sumberdaya alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Government

Untuk mengetahui bahwa e-government pada Desa Dlingo sudah terjamin dapat mengolah dan member informasi secara elektronik maka diukur dengan 4 (empat) lapis struktur berikut ini:

1. Akses

Desa Dlingo merupakan desa terpencil dan keberadaannya paling

jauh diantara desa-desa lainnya di Kabupaten Bantul. Namun Desa Dlingo sudah mempunyai akses yang memadai untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa. Melalui alokasi ADD Tahun 2013 Karang Taruna mendirikan Tower Internet dan jaringan wifi gratis dengan pengamanan jaringan Open DNS sebagai pengendali akses negative. Pemerintahan Desa Dlingo juga memasang wifi secara mandiri. Dimana mereka berinisiatif untuk mengadakan akses wifi dan membayar sendiri setiap bulannya. Hal ini agar masyarakat Desa Dlingo dapat dengan mudah mengakses sistem informasi desa secara *online*. Seperti yang disampaikan

2. Portal Pelayanan Publik

Portal layanan publik yang dimaksud adalah situs web

pemerintah Desa Dlingo yang berbasis internet yang memberikan informasi dan dokumen elektronik dari instansi terkait. Portal layanan publik yang dimaksud adalah situs web pemerintah Desa Dlingo yang berbasis internet yang memberikan informasi dan dokumen elektronik dari instansi terkait. Dengan adanya portal pelayanan publik ini memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan mengakses informasi yang disediakan. Portal pelayanan publik ini memudahkan pengunjung dengan hanya mengunjungi sebuah *website* terdiri dari beberapa aspek informasi pemerintah maupun masyarakat.

Portal pelayanan publik Desa Dlingo ini tidak hanya berupa website akan tetapi terdapat juga dari berbagai sosial media seperti facebook, twitter, youtube dan instagram. Masing-

masing sosial media ini ada dalam *website* Desa Dlingo, pengunjung hanya tinggal meng-*klik* ikon sosial media tersebut maka akan langsung terhubung.

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi

Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi adalah yang menyediakan, mengelola, dan mengolah informasi dan dokumen elektronik bisa disebut juga dengan *back office*.

Pada implementasi Sistem Informasi Desa di Dlingo pemerintahan desa mengadakan tim khusus untuk melaksanakannya. Kabupaten Bantul mengintruksikan kerjasama antara KPDT, Desa Dlingo dan juga *Combine* untuk membangun sistem informasi desa. Setelah adanya aplikasi dan berjalannya sistem informasi desa, Desa Dlingo

membentuk komunitas Sandigita (Sasana Anak Muda Dlingo Giriloji Pecinta Teknologi). Kemudian pemerintah Desa Dlingo mewajibkan semua staffnya bisa menggunakan computer untuk menginput data kependudukan dan informasi apapun yang berkaitan dengan desa baik itu potensi dan juga kegiatan-kegiatan. Pemerintah Desa Dlingo membagi tim pengelola khususnya menjadi beberapa bagian yaitu menginput bagian data penduduk, berita dan juga agenda. Dalam hal ini pemerintah desa menghadirkan pemerintah kabupaten Bantul dan CRI untuk mengajarkan pengelolaan penggunaan SID pada tim khusus ini.

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam komunikasi terdapat dimensi transmisi yang bertujuan kebijakan atau program yang ada tidak hanya disampaikan ke implementator atau pelaksana tetapi juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak berkepentingan dengan program tersebut. Proses komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Dlingo dengan mengundang perangkat desa yakni kepala dukuh serta ketua-ketua RT Desa Dlingo menginformasikan akan dijalkannya program sistem informasi desa yang bertujuan memperbaiki pelayanan publik untuk pembangunan desa yang lebih baik.

Dalam dimensi kejelasan juga aparatur Desa Dlingo diberi pelatihan untuk mendapat pengetahuan mengenai sistem informasi desa. Dimana CRI (*Combine Resource Institution*) sebagai penggagas dan juga pengembang sistem

informasi desa memfasilitasi pelatihan tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah, gagasan dan tujuan dari adanya sistem informasi desa.

Dalam dimensi konsistensi diharapkan pemerintahan Desa Dlingo konsisten pada pelaksanaan sistem informasi desa ini dengan adanya pedoman peraturan dari Undang-undang Tahun 2014 tentang Desa. Lebih jelas lagi terdapat pada pasal 86 yang merujuk tentang sistem informasi desa yang menyebutkan desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun kota. Sistem informasi desa sebagaimana pada ayat 2 (dua) meliputi data Desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Sistem informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dikelola oleh pemerintahan desa dan dapat diakses

oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa.

Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di Desa Dlingo sudah memiliki sesuai dengan apa yang diharapkan. Terbukti dengan seiring pengimplementasian Sistem Informasi Desa di Dlingo mendapat penghargaan dari Kabupaten Bantul sebagai Desa Pelaksana SID terbaik. Kualifikasi para aparatur pun sudah sesuai untuk menjadipara aparatur pemerintah Desa Dlingo terutama yang menjadi operator *website*.

b. Sumberdaya Peralatan

Peralatan atau dalam hal ini perangkat sebagai alat berjalannya Sistem Informasi Desa (SID) di Dlingo sudah sangat memadai sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan. Selain sudah memenuhi kriteria untuk menjalankan sebuah website, jumlah peralatan pun sesuai dengan jumlah aparatur yang menngimplementasikan website Desa Dlingo.

c. Sumberdaya Kewenangan

Implementator dalm hal ini aparatur pemerintah Desa Dlingo mempunyai kewenangan yang cukup dalam melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID). Kewenangan pun digunakan dengan optimal oleh Lurah Desa untuk menggerakkan masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam menjalankan bersama-sama implementasi sistem informasi desa ini.

Pembangunan Desa

Dalam hal pembangunan desa sistem informasi desa (SID) Dlingo membawa pengaruh positif pada pembangunan Desa Dlingo. Hal ini terbukti dengan meningkatkannya pendapatan dan ekonomi masyarakat yang didapat dari sector pariwisata. Hal ini didukung dengan adanya sistem informasi desa yang semakin mengenalkan dan menarik perhatian masyarakat luas terhadap Desa Dlingo.

Kesimpulan

Penelitian ini adalah tentang bagaimana kebijakan Sistem Informasi Desa Dlingo (SID) memberikan dampak positif terhadap pembangunan Desa Dlingo. Bagaimana Sistem Informasi Desa yang ada mampu membangun Desa Dlingo menjadi Desa yang mampu mandiri dalam menyejahterakan

masyarakat Desa Dlingo dengan sumberdaya yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian ini implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dlingo pada tahun 2017 berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti mengambil kesimpulan akses dalam implementasi sistem informasi desa di Dlingo akses sudah sangat mudah. Dengan berdirinya tower mandiri dan wifi memudahkan masyarakat mengakses website Dlingo. Hal ini turut menunjang efektifnya penggunaan sistem informasi desa dimana masyarakat jadi tergugah dan ingin menggunakan sistem informasi desa karena kemudahan akses tersebut.

Selain akses yang sudah sangat mudah, juga ditunjang dengan sumberdaya peralatan yang memadai didapat dari pemerintahan Kabupaten Bantul. Selain itu sumberdaya manusia yang sudah dapat mengoperasikan website Dlingo. Sumberdaya manusia

yang berkompeten sudah mendapat pelatihan baik dari CRI (COMBINE Resource Institution) maupun pemerintah Bantul.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa digunakan dengan baik untuk memajukan implementasi sistem informasi desa ini. Dimana pemerintah desa turut mengajak serta masyarakat untuk ikut andil.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim. (2010). *Buku Panduan Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah Peserta USDRP*. Jakarta.
- Beratha, D. I. (1982). *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Balai Aksara.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanif, N. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan & Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Huda, N. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrajid, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*. Yogyakarta.
- Jahja, R., & dkk. (2012). *Sistem Informasi Desa*. Yogyakarta: COMBINE Resource Institution (CRI).
- Kartasasmita, G. (2001). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Miles, M. d., & A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBangMediatama.

Sudirman. (2002). *Tesis : Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektifitas* . Bandung.

Susilo, M. J. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Reppublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, H. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

INTERNET

Pembangunan Desa di Otonomi Daerah di akses pada website <http://bappeda.langkatkab.go.id/> pada tanggal 20 Desember pukul 22.00 WIB
Desa Dlingo Pelaksana SID Terbaik Se-Kabupaten Bantul di akses pada website <http://dlingo-bantul.desa.id/> pada tanggal 8 Januari pukul 19.00 WIB